

KOORDINASI KOMITE SEKOLAH DI SMA NEGERI 7 KOTA PONTIANAK

Angga Sofiana Putra, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: san_doval19@yahoo.com

Abstrak

Pelaksanaan Komite Sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga lebih mandiri. Penelitian ini difokuskan pada pembagian tugas, kesatuan arah dan tindakan, dan hubungan kerja sama. Fokus-fokus tersebut dibahas dengan metode kualitatif dan studi kasus di SMA Negeri 7 Pontianak. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pada pembagian tugas, kesatuan arah dan tindakan, hubungan kerja sama belum terlaksan sesuai harapan. Oleh karena itu, dari fokus pembagian tugas peneliti menyarankan agar lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas pengurus tetapi bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya. Saran untuk fokus kesatuan arah dan tindakan diharapkan dapat melaksanakan kesatuan tindakan dengan cara melakukan pertemuan bersama. Adapun saran untuk fokus hubungan kerja sama harus mempunyai sikap saling pengertian, saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi agar tujuan program Komite Sekolah dalam rangka pelayanan pendidikan dapat tercapai sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Kata kunci: Koordinasi Komite Sekolah, Pembagian Tugas, Kesatuan Arah dan Tindakan, Hubungan Kerja Sama

Abstract

Implementation of the School Committee give greater autonomy to schools. Schools have the authority and greater responsibility in managing the school, making it more independent. This study focused on the division of labor, unity of direction and actions, and cooperative relations. Foci are discussed with qualitative methods and case studies in SMAN 7 Pontianak. From the research it was found that the division of labor, unity of direction and action, cooperation has not terlaksan as expected. Therefore, the focus of the division of tasks researchers suggest that more attention to the quality and quantity of the board but how to carry out its duties and functions. Suggestions for the direction and focus of unity of action is expected to implement the unity of action by way of joint meetings. As for the suggestion to focus cooperation should have mutual understanding, co-exist, help each other, and complement each other so that the School Committee program objectives in order to achieve educational services as predefined.

Keywords: Coordination Committees School, Division of Labor, Unity of Direction and Action, Equal Employment

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan Komite Sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan/potensi yang dimiliki. Dengan melibatkan warga sekolah dan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan sekolah, rasa memiliki terhadap sekolah dapat ditingkatkan. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab.

Melalui pelaksanaan Komite Sekolah dapat memberikan otonomi yang lebih luas, disamping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, perlu kiranya melibatkan masyarakat (orang tua murid) dalam pengelolaan sekolah. Sehubungan dengan itu, keterlibatan orang tua murid merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, oleh para penyelenggara pendidikan, baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, maupun di sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri.

Implikasi dari pelaksanaan koordinasi Komite Sekolah tersebut adalah berkurangnya peran pemerintah dan berkembangnya peran sekolah, dalam pengelolaan sekolah. Dalam hal ini, sekolah tidak dapat lagi hanya mengandalkan pemerintah semata, melainkan harus melalui basisnya, yaitu masyarakat melalui orang tua murid. Atas dasar hal tersebut, keterlibatan orang tua murid dalam pelaksanaan Komite Sekolah, sangat diharapkan bahkan akan menjadi penentu kemajuan pendidikan di sekolah.

Permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 7 Pontianak ialah mengenai

koordinasi komite sekolah, antara lain: (a) Terdapat kecenderungan bahwa komite sekolah adalah wewenang mutlak kepala sekolah. (b) Pertemuan yang dilakukan terhadap masyarakat sekolah bukan dalam rangka mendiskusikan masalah pengembangan anak, melainkan menjadi rapat pengumpulan dana. (c) Pihak Sekolah dan pihak pengelola Komite Sekolah sebagai mitra melaksanakan program Komite Sekolah belum terjalin kerja sama yang baik. Fokus penelitian: pembagian tugas, kesatuan arah dan tindakan, dan hubungan kerja sama.

Rumusan masalah: Bagaimana pelaksanaan koordinasi fungsional Komite Sekolah dalam proses pendidikan di SMA Negeri 7 Pontianak? Tujuan penelitian: (a) Untuk memaparkan pembagian tugas yang jelas dan tegas dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 7 Pontianak. (b) Untuk menggambarkan pelaksanaan usaha untuk menyatukan arah atau tindakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 7 Pontianak. (c) Untuk mengungkapkan kerja sama diantara unit kerja dalam proses penyelenggaraan pendidikan di SMA 7 Pontianak.

B. KOORDINASI KOMITE SEKOLAH

Sasaran dari kebijaksanaan umum pemerintah yang ditujukan bagi terlaksananya tugas serta kegiatan dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya diperlukan adanya koordinasi. Menurut Priyono (2005: 16) bahwa koordinasi adalah suatu proses rangkaian menghubungkan tujuan dengan menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa koordinasi erat kaitannya dengan tujuan dalam setiap organisasi agar dapat terlaksana keduanya harus dihubungkan.

Aktivitas pengkoordinasian secara fungsional yang dilakukan mencakup

berbagai aspek, sebagaimana dikemukakan oleh Moekijat (2005: 125) :

- 1) Adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas diantara unit Komite Sekolah dengan tetap memperhatikan pengelompokan bidang kerja yang sejenis dan volume beban kerja.
- 2) Adanya usaha untuk menyatukan arah atau tindakan diantara unit Komite Sekolah.
- 3) Adanya kerja sama diantara unit Komite Sekolah dalam pelaksanaan tugas tertentu sedemikian rupa.

Dengan adanya 3 aspek dari Moekijat tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi yang baik selalu mengacu kepada pengaturan tata hubungan kerja sama yang harmonis, kesatuan arah dan tindakan serta adanya pembagian tugas yang jelas dan tegas. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatasi jangan terjadinya tumpang tindih dan perebutan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawab.

Komite Sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi, memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rohiat, 2008: 14).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa komite sekolah memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah. Sekolah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga lebih mandiri. Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki.

Komite sekolah dipandang sebagai unit manajemen yang utuh dan memerlukan perlakuan khusus dalam upaya pengembangannya. Perlakuan atau *treatment* khusus itu akan berbeda untuk setiap sekolah (Fattah, 2009: 39). Itulah

hal yang melandasi keyakinan bahwa pengambilan keputusan dalam merancang dan mengelola pendidikan seharusnya dilakukan oleh pengelola di tingkatsekolah. Namun demikian, sekolah tidak memiliki kapasitas untuk berjalan sendiri tanpa menghiraukan kebijakan, prioritas dan standarisasi yang diamanatkan oleh pemerintah yang telah ditentukan secara demokratis atau politis.

Komite sekolah menurut Rohiat (2008: 47) dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah dan masyarakat serta meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada era reformasi, dimana komite sekolah mulai dilaksanakan, maka untuk menunjang program tersebut, sangat diperlukan keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam penyelenggaraan program pendidikan. Keterlibatan tersebut diperlukan dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu pendidikan, sehingga program peningkatan mutu dapat dicapai. Sehubungan dengan itu, diperlukan pula organisasi Badan Peran Serta Masyarakat yang disebut Dewa Pendidikan dan Komite Sekolah.

Sementara itu, Komite Sekolah berkedudukan di sekolah yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan sekolah, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2001: 24).

Mengamati pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa komite sekolah yang beranggotakan guru, kepala sekolah, orang tua siswa, praktisi pendidikan, pemuka masyarakat, LSM, dan lain-lain berperan mendampingi kepala sekolah

dalam mengambil kebijakan dan sekaligus mengontrol pelaksanaannya. Oleh karena itu, segala kebijakan yang akan ditetapkan di sekolah harus dikomunikasikan atau dimusyawarahkan atau mendapat persetujuan dari komite sekolah. Dengan demikian berbagai aspirasi yang ingin disampaikan masyarakat, sehubungan dengan proses penyelenggaraan pendidikan, setidaknya harus disampaikan melalui komite sekolah.

Berdasarkan uraian tentang koordinasi dan komite sekolah sebagaimana disampaikan di atas, selanjutnya dapat diberikan kesimpulan bahwa komite sekolah bertujuan agar otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat mempunyai keterlibatan yang tinggi.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah dengan metode kualitatif. Alasan menggunakan metode atau pendekatan ini dikarenakan penelitian ini ingin mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana koordinasi komite sekolah dengan membandingkan, menghubungkan, dan memilah-milah data yang ada sesuai dengan informasi di lapangan.

Informan dalam penelitian ini: Pengurus komite sekolah, orang tua siswa, perwakilan sekolah (OSIS), pengawas sekolah dan pejabat Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Yang menjadi informan kunci ialah kepala sekolah SMA Negeri 7 Pontianak. Informan-informan yang dipilih tersebut ialah orang-orang yang berkaitan atau memahami sesuatu yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan obyek yang menjadi bahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini juga ingin mencoba menguraikan atau memfokuskan jawaban-jawaban dari informan.

D. PELAKSANAAN KOORDINASI FUNGSIONAL KOMITE SEKOLAH

1. Pembagian Tugas yang Jelas dan Tegas

Pembagian tugas yang jelas dan tegas diantara unit kerja yaitu dengan selalu memperhatikan pengelompokan bidang kerja yang sejenis dan volume beban kerja. Sehingga dapat menghindari adanya kekembaran dan kekosongan pekerjaan. Pembagian tugas menjamin keselarasan yang baik diantara kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang berlainan, mencegah gangguan-gangguan dalam pelaksanaan pekerjaan yang disebabkan oleh alasan-alasan, seperti penngguhan dalam penyediaan bahan-bahan, alat-alat atau pengarahan-pengarahan yang tidak jelas, kelalaian-kelalaian atau pembagian kewajiban-kewajiban yang salah dan menghapuskan duplikasi pekerjaan.

Komite Sekolah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku kepala sekolah, guru dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan sekolah. Pelaksanaan pembagian kerja Komite Sekolah berpotensi meningkatkan gesekan peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Berdasarkan informasi dari Kepala SMA Negeri 7 Pontianak, diperoleh keterangan bahwa sistem pembagian kerja dengan terbentuknya Komite Sekolah, sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan rapat-rapat dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan sekolah, menjembatani kepentingan sekolah dengan orang tua dan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas Sekolah, diperoleh keterangan bahwa, dalam rangka kesiapan sumber daya yang terkait dengan pelaksanaan pembagian tugas Komite Sekolah, ada beberapa hal yang belum diperhatikan seperti: sekolah belum mampu menampilkan pengelolaan sumber daya secara transparan, demokratis, tanpa

monopoli, dan tanggung jawab terhadap masyarakat maupun pemerintah dan sekolah belum sepenuhnya dapat menjabarkan kebijaksanaan pendidikan yang menjadi prioritas nasional dalam merumuskan pelaksanaan Komite Sekolah sesuai dengan potensi dan lingkungan sekolah.

Lebih lanjut berdasarkan hasil temuan penelitian dan diperkuat dengan hasil observasi lapangan, menunjukkan bahwa SMA Negeri 7 Pontianak sudah membentuk keanggotaan Dewan Sekolah melalui Komite Sekolah yang terdiri dari: Guru, kepala sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Namun pelaksanaan tugas dan fungsi dari Komite Sekolah belum sepenuhnya dapat menjalankan pembagian tugas dan fungsinya seperti: menyelenggarakan rapat-rapat dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan sekolah, menjembatani kepentingan sekolah dengan orang tua, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional, meningkatkan tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan pada SMA Negeri 7 Pontianak, membuat atau menyusun AD/ART Komite Sekolah pada SMA Negeri 7 Pontianak dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, demokrasi dan penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan Komite Sekolah pada SMA Negeri 7 Pontianak.

2. Kesatuan Arah dan Tindakan

Kesatuan arah atau tindakan berarti tiap-tiap masyarakat sekolah yang terlibat dalam Komite Sekolah hendaknya hanya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab kepada pihak sekolah dan orang tua siswa. Tidak ada satupun organisasi termasuk Komite Sekolah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, apabila tidak memperhatikan garis-garis

saluran program yang jelas, sebaliknya harus jelas pula sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SMA Negeri 7 Pontianak, diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan kesatuan tindakan atau arah dalam melaksanakan program Komite Sekolah ini sering mengalami kesulitan, karena adanya anggapan bahwa Komite Sekolah sebagai pengawas terhadap aktivitas sekolah. Keadaan ini sangat mempengaruhi hubungan antara pihak komite sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa. Hubungan tersebut tidak terlepas dari dukungan partisipasi orang tua siswa dan pihak sekolah dalam suatu program kegiatan tersebut.

Pentingnya kesatuan arah dan tindakan dalam perencanaan program pendidikan dan pengembangan sekolah disebabkan perencanaan merupakan landasan pokok dari semua aktivitas kegiatan masyarakat. Baik secara individu maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan juga didasarkan pada kepentingan pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya untuk mengetahui proses perencanaan pengembangan sekolah dalam kaitannya terhadap partisipasi atau keterlibatan orang tua siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Komite Sekolah, bahwa usaha dalam melakukan kesatuan tindakan dengan merealisasikan visi, misi dan tujuan di sekolah, yaitu dengan melalui pertemuan rapat, guna membicarakan masalah program-program pengembangan sekolah. Pada saat dilakukan pertemuan, seluruh orang tua siswa diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut. Namun pada kenyataannya yang hadir, hanya sebagian kecil saja.

3. Hubungan Kerja Sama

Pada dasarnya koordinasi selalu menekankan pentingnya hubungan manusia, secara relatif mudah mendapatkan suatu cara yang baik, tetapi

kesulitannya adalah mendapatkan bermacam-macam kesatuan persepsi untuk bekerja sama dengan suatu cara yang dikoordinasikan. Untuk itu harus diadakan suatu tindakan yang pasti untuk menciptakan koordinasi yang diinginkan. Semua unit kerja yang terkait harus didorong untuk saling tukar saran, ide dan pikiran melalui suatu hubungan kerja sama. Melalui cara yang demikian, maka diharapkan setiap unit yang terkait akan mengetahui sudut pandang dan masalah organisasi yang sedang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Komite Sekolah, diperoleh informasi bahwa hubungan kerja sama yang terjadi diantara pengurus Komite Sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa dalam rangka melaksanakan pelayanan pendidikan terlihat kurang harmonis, karena diantara pengurus Komite Sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa tersebut kurang adanya perasaan lepas satu sama lain antara masing –masing. Komite Sekolah desentralisasi dalam bidang pendidikan, dalam rangka perwujudan reformasi pendidikan, pada prinsipnya memperoleh pendelegasian kewenangan yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat serta menjauhi birokrasi yang bersifat sentralistik.

Berdasarkan hasil wawancara dari pengawas sekolah, diperoleh keterangan bahwa hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pihak sekolah (SMA Negeri 7 Pontianak) dengan Komite Sekolah, belum terlaksana sesuai dengan harapan. Hal tersebut terlihat dari belum terwujudnya suatu keadaan yang saling ketergantungan melalui suatu penyesuaian bersama, terutama dalam rangka menjadikan sekolah yang lebih mandiri, inovatif dan kreatif, melakukan pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, selaku pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengontrol dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan keluaran pendidikan.

E. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis yang Peneliti lakukan, maka ada 3 (tiga) kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan koordinasi fungsional dilihat dari pembagian tugas Komite Sekolah belum terlaksana sebagaimana mestinya, karena dalam pelaksanaannya tanpa didasarkan kepada asas koordinasi yaitu belum mengarah kepada tugas dan fungsi seperti menjembatani kepentingan sekolah dengan orang tua, mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional. Peneliti menyarankan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan Komite Sekolah ini tidak hanya tugas dibagikan kepada pengurus tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas pengurus tetapi bagaimana melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Pelaksanaan koordinasi fungsional dilihat dari kesatuan arah dan tindakan antara Komite Sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa di SMA Negeri 7 Pontianak belum terlaksana sesuai harapan. Hal tersebut terlihat dari kurangnya penyelenggaraan rapat-rapat dan menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan sekolah sebagai tanggungjawab dan peran serta masyarakat sekolah (pihak sekolah, Komite Sekolah, siswa dan orang tua siswa) dalam menyelenggarakan pendidikan pada SMA Negeri 7 Pontianak. Peneliti menyarankan dalam rangka menyatukan tindakan atau kebulatan pikiran, maka masing-masing komponen yaitu pengurus Komite Sekolah, pihak sekolah dan orang tua siswa diharapkan dapat melaksanakan kesatuan tindakan dengan cara melakukan pertemuan bersama, selalu melakukan pertukaran informasi dan selalu meminta pendapat kepada kelompok yang terkait, agar segala kelemahan yang

terjadi dapat teratasi atau tertanggulangi.

3. Pelaksanaan koordinasi fungsional dilihat dari hubungan kerja sama yang terjadi antara pengurus Komite Sekolah dengan pihak sekolah dan orang tua siswa belum berjalan sebagaimana diharapkan, karena belum terjalinnya hubungan formal dan informal, seperti, jarang melakukan pertemuan atau musyawarah kerja, selalu merasa tugasnya yang paling penting dan tidak adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Dengan keadaan yang demikian selalu terjadi kesalah-pahaman, dalam bertindak dan terkadang sering terjadi saling melempar tanggung jawab yang

akhirnya segala keputusan yang diambil kurang tepat. Peneliti menyarankan untuk mejalin hubungan kerja sama, sedapat mungkin

F. REFERENSI

- Fattah, Nanang. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management)*. Bandung: CV.Andira
- Moekijat. 2003. *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Mandar Maju.
- Priyono. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rohiat. 2008. *Manajemen Sekolah (Teori Dasar dan Praktik)*. Bandung: PT. Refika Aditama



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnal.mahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnal.mhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : ANGGA SOFIANA PUTRA
NIM / Periode lulus : E21108008
Fakultas/Jurusan : FISIPOL / IAN
E-mail address/HP : san_doval19@yahoo.com / 085386210612

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....*) pada Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Koordinasi Komite Sekolah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal Dr. Endi M Si

NIP. 196707272009011001

Dibuat di :
Pada tanggal:

(ANGGA SOFIANA PUTRA)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).